

PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP *SMART VILLAGE GOVERNMENT* DI KABUPATEN BANDUNG

**Agustina Setiawan, Titin Rohayatin, Siti Munawaroh,
Dadan Kurnia, Iing Nurdin, Toto Kushartono**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani
siti.munawaroh@lecture.unjani.ac.id

Abstract

The Community Service carried out has the goal of providing an understanding of theory and practice related to the concept of managing village funds through a smart village. In this case, the theme of governance was chosen because the villages in Bandung Regency have the opportunity to implement village governance by carrying out the concept of smart village government. However, until now not all villages in Bandung Regency have implemented the concept of smart village government. This happened because not all of the villages in Bandung Regency understood the strategy for implementing good governance, and did not know the strategic position and benefits of its infrastructure. The implementation of community service is carried out using several methods such as providing materials, focus group discussions (FGD), lectures, and evaluations. In order to be able to implement the functions of this smart village, the skills of the village apparatus are required. Human Resources (HR) play an important role in realizing a smart village, and of course this is also supported by village facilities and infrastructure. Based on the results of the Community Service that has been carried out, the Bandung Regency Village Government hopes to make the village smart, this will certainly bring the village in a better direction. Therefore, it is hoped that the education and training village related to the smart village government will be held in a sustainable manner.

Keywords: Smart Village, Village government, Government.

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pemahaman terkait teori dan praktek terkait konsep pengelolaan dana desa melalui smart village. Dalam hal ini, tema tata kelola pemerintahan dipilih karena desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung mempunyai peluang dalam menerapkan tata kelola desa dengan mengadopsi konsep smart village government. Akan tetapi, hingga saat ini belum semua desa yang ada di Kabupaten Bandung menerapkan konsep smart village government. Ini terjadi karena kepada desa di Kabupaten Bandung belum semuanya memahami strategi penerapan good governance, serta tidak mengetahui posisi strategis serta manfaat infrastruktur yang dimilikinya. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa metode seperti memberikan materi, focus group discussion (FGD), ceramah, dan evaluasi. Agar dapat mengimplementasikan fungsi dari smart village ini, diperlukan keterampilan dari aparat desa. Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran penting untuk dapat mewujudkan smart village, dan tentu hal ini juga didukung oleh sarana serta prasarana desa. Berdasarkan hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Kabupaten Bandung berharap menjadikan desanya smart, hal ini tentunya akan membawa desa ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, harapan dari pihak desa pendidikan dan pelatihan terkait smart village government ini akan diselenggarakan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Smart Village, Pemerintah Desa, Government.

PENDAHULUAN

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang diharuskan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki pergeseran paradigma di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di Indonesia. Selama ini, desa menjadi obyek pemerintahan yang ada di atasnya, akan tetapi dengan adanya UU ini kemudian memposisikan desa sebagai subjek serta dapat untuk menentukan arah dari pembangunannya sendiri. Dalam hal ini, terbantu adanya perubahan pengaman aliran pendapatan yaitu tidak hanya dari APBD dan PAD saja, tetapi juga dari APBN. Adanya perubahan paradigma tersebut, harapannya desa mampu menjadi mandiri dan kuat. Desa mandiri adalah desa yang berdaulat secara politik, serta desa kuat yaitu desa yang mampu untuk mengatur serta mengurus kepentingannya dan memiliki kapasitas.

Anggaran menjadi salah satu unsur perubahan paradigma dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kuatnya anggaran pemerintah desa menuntut pemerintah desa untuk sungguh-sungguh menciptakan desa yang tangguh serta mandiri. Cita-cita tinggi ini sulit diwujudkan tanpa memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Implementasi *good governance* dapat dicapai dengan memperkenalkan konsep *smart village government*. Pemerintah mencanangkan *smart village government*, yang secara garis besar dapat disebut sebagai desa cerdas,

dengan mengimplementasikan inovasi sosial berbasis platform digital atau teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pencapaian Desa Pintar juga diharapkan dari segi efisiensi dan daya saing kota-kota di bidang kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pengelolaan *smart village* pengembangannya tidak terbatas pada pemanfaatan teknologi informasi, melainkan pada upaya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa sesuai dengan peningkatan nilai ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. *Smart Village government* merupakan program unggulan pelatihan sinergis melalui pendidikan dan pemberdayaan sehingga diharapkan dapat menjadi model percontohan khususnya bagi desa-desa sekitar. Konsep *smart village* mengembangkan informasi desa, dalam hal teknologi informasi dan membangun keunggulan masyarakat yang melek digital sehingga dapat memberikan nilai tambah terutama dalam pelaksanaan pengelolaan desa secara internal dan eksternal.

Desa memiliki peran yang penting dalam menentukan arah dari kebijakan serta pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam hal ini penguatan kawasan perdesaan harus dijadikan prioritas. Pemerintah memiliki tugas untuk menempatkan daerah pedesaan sebagai pusat pembangunan manusia, sosial, infrastruktur dan ekonomi.

Menurut Wiswanadham (2010) berpendapat bahwa *Smart Village government* adalah layanan yang menggunakan teknologi informasi secara efektif dan efisien dalam kegiatan desa yang dikelola oleh masyarakat desa. *Smart Village* merupakan konsep yang dapat

digunakan untuk menangani masalah di daerah yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara cerdas, bijaksana, serta efisien dan tetap mengedepankan budaya dan adat yang dominan (Djunaedi, & Herwangi, 2019).

Karakteristik dari wilayah desa, budaya, dan masyarakat yang berbentuk homogen, ini menjadi alasan mengapa perkembangan dari desa berbeda dengan wilayah perkotaan, yaitu dalam pemanfaatan teknologi, informasi, serta komunikasi (TIK). Untuk penerapan TIK perlu adanya struktur atau konsep yang menjadi dasar karakteristik wilayah desa, dengan demikian dapat menciptakan sebuah sinergi antara pengelola, masyarakat, serta lingkungan berdasarkan karakter, standar, dan nilainya (Herdiana, 2019).

Dalam hal ini, dengan adanya *smart village* dapat menjadi sebuah solusi dari permasalahan pengelolaan desa. Dengan masuknya komponen *smart city*, bukan tidak mungkin desa menjadi kekuatan ekonomi nasional berbasis UKM, SDM unggul, tata kelola yang *clean*, transparan dan lingkungan sosial yang baik.

METODE

Metode serta bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan penguatan *good governance* melalui konsep pengelolaan desa cerdas akan dilaksanakan melalui metode pelatihan menggunakan bahan ajar dengan metode yang relevan yaitu, metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Dalam hal ini, berikut tahapan pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

- 1) Survei lapangan, untuk melihat secara langsung keadaan serta kondisi sosial masyarakat dan pemerintahan desa

- 2) Pelatihan, yaitu dengan memberikan materi berupa pengetahuan serta pemahaman terkait konsep *smart village government* dengan tema digitalisasi desa
- 3) Diskusi, untuk melihat persoalan serta hambatan pemerintahan desa dalam menjalankan konsep *smart village government*, dan
- 4) Evaluasi, dengan adanya keterlibatan kepala desa yang tergabung dalam Forum Kepala Desa Kabupaten Bandung.

Selain penyampaian materi dalam pelatihan tersebut diselenggarakannya *Focus Grup Discussion* (FGD) dengan tema sebagai berikut:

- a. Kajian Ilmu Pemerintahan
- b. Kajian Hubungan Internasional
- c. Kajian Ilmu Hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul: “Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep *Smart Village Government* Di Kabupaten Bandung” telah dilaksanakan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan ini dilakukan dalam beberapa tahap, seperti :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal ini, para dosen FISIP Unjani melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan ini. Sosialisasi ini diberikan kepada para Kepala Desa serta seluruh aparat Pemerintah Desa dilingkungan Kabupaten Bandung. Setelah itu penyelenggara melakukan

dan mengidentifikasi calon peserta Pendidikan dan pelatihan dengan cara mengisi google form untuk memastikan keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penyelenggara merekap daftar peserta dalam kegiatan dan pelatihan tersebut. Tahap persiapan ini dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu.

2. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep *Smart Village Government* di Kabupaten Bandung dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juli Tahun 2022 melalui metode konvensional/ luring atau tatap muka yang bertempat di Aula Gedung TNI Mulyono FISIP Unjani lantai 4. Pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut dilakukan secara *off line* dengan jumlah peserta 121 orang dari unsur para Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Bandung.

3. Tahap Evaluasi

Dalam tahap ini, tim pelaksana kegiatan PPM melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan mulai dari penyusunan, pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan hingga hasil kegiatan, termasuk publikasi hasil kegiatan.

4. Hasil Kegiatan

1. Waktu Kegiatan

- a. Proses persiapan. Kegiatan PPM ini secara keseluruhan diselenggarakan selama 3 bulan, dari mulai pembuatan proposal, pemberian informasi terkait kegiatan “Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep *Smart Village Government*

Di Kabupaten Bandung.”

- b. Pengiriman informasi dilaksanakan melalui surat resmi kepada DPMD Jawa Barat dan DPMD Kabupaten Bandung serta kepada ketua APDESI.
- c. Kegiatan puncak Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep *Smart Village Government* Di Kabupaten Bandung dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 mulai pukul 07.30 - 17.30 WIB.

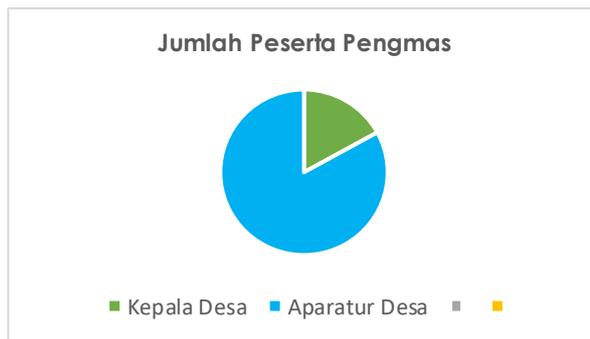
2. Sifat dan Tempat Kegiatan

- a. Kegiatan PPM ini dilaksanakan bersifat *offline*.
- b. Tempat kegiatan PPM diselenggarakan di Ruang Aula Lantai 4 Gedung Jenderal TNI Mulyono FISIP Unjani Cimahi.

3. Peserta kegiatan

- a. Peserta dalam kegiatan PPM dengan judul Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep *Smart Village Government* di Kabupaten Bandung sebanyak 121 orang yang merupakan para Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Bandung.
- b. Jumlah peserta kegiatan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang diselenggarakan dengan konsep *Smart Village Government* di Kabupaten Bandung

tersebut secara keseluruhan berjumlah 121 orang, yang terdiri dari Kepala Desa sebanyak 21 atau sebesar 17 %, Aparatur Pemerintah Desa sebanyak 100 atau 83 %. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar grafik berikut di bawah ini :



Gambar 1. Peserta Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep *Smart Village Government* di Kabupaten Bandung

4. Materi Kegiatan

Pemateri dalam kegiatan ini yaitu :

- a. Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc sebagai Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat
- b. Yessi Samsiah, S.STP sebagai Kabid. Penataan Desa DPMD Kabupaten Bandung
- c. Drs. Rambey SP.,M.Si sebagai Kabid. Administrasi Desa DPMD Kabupaten Bandung Barat
- d. Tim Dosen dilingkungan FISIP Unjani.

Materi Kegiatan dalam Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui

Konsep *Smart Village Government* di Kabupaten Bandung sebagai berikut:

a. Kapasitas Perencanaan Pembangunan

Dalam materi ini mengandung muatan bahwa berbicara terkait dengan kapasitas Perencanaan pembangunan maka unit terkecil dalam kapasitas perencanaan pembangunan sebagai pusat berkumpulnya masyarakat, merupakan level terakhir atau ujung tombak dari otonomi daerah secara nasional, keunikan potensi desa sebagai modal bagi keberhasilan pembangunan, kapasitas pemerintahan desa beserta pemangku kepentingan lainnya beserta sarana dan prasarana desa, masih harus terus ditingkatkan, sejalan dengan kemajuan dan era pembangunan yang dihadapi, pentingnya keterpaduan dari seluruh *stakeholders* dalam membangun desa, dengan segala dinamikanya, terjaminnya kemajuan desa bagi masyarakatnya serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan pada umumnya, peran strategis desa dalam pembangunan IDM (sosial, ekonomi, lingkungan) sebagai indikator dalam pendekatan teknokratik. Terjadinya transformasi pemanfaatan peningkatan kualitas layanan dasar serta pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Program peningkatan taraf hidup serta pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digitalisasi dalam upaya untuk mendorong literasi digital, dan *Internet of Things* (IoT), dan ragam inovasi digital. Upaya percepatan digitalisasi perdesaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Perluasan jangkauan internet di perdesaan, pembangunan jaringan infrastruktur internet perdesaan pengelolaan internet mandiri oleh Bumdes melalui kawasan desa digital.

- 2) peningkatan layanan pemerintah desa berbasis digital, rekening kas desa dalam bentuk giro (*single account*) implementasi ibc (*internet banking corporate*) mendukung pembayaran non tunai (*cashless*) aplikasi layanan keuangan desa secara online (*siskeudes online, smart village dan social fund transfer/blt*), serta kemudahan layanan bagi publik
- 3) Pendayagunaan dan pengembangan potensi desa, penyusunan “big data desa” pengembangan dashboard desa juara, sinergitas pemanfaatan data bersama instansi/OPD dan mitra lainnya
- 4) TALESA (Pusat Digital Ekonomi Desa), Pusat Layanan dan Bisnis (PPOB/Payment Point Online Banking, Agen Pos, Pegadaian, Pom Mini dll) Pusat Pemasaran Produk Desa/ ecommerce (Tokopedia Center, Shopee Village Center dll) Pemanfaatan IoT untuk produktivitas melalui Desa Digital Tematik (Pertanian, Perikanan, Kesehatan, Pendidikan, Multimedia, Waste Management dll)

b. Kapasitas Pengelolaan MSDM Perangkat Desa

Dalam materi ini mengandung muatan bahwa desa merupakan pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat, serta pilar utama dari keberhasilan program pemerintah. Karena dalam hal ini

pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakatnya.

Pemberdayaan desa yang dilakukan bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga untuk dapat meningkatkan kemampuan pelayanan pada masyarakat. Hal lain yang perlu dipastikan yaitu tersedianya dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan masyarakat, dan juga ketersediaan sumber daya manusia.

Dimensi untuk meningkatkan keterampilan perangkat desa yaitu meliputi keterampilan, pengetahuan, serta wawasan yang didapatkan melalui pembelajaran, pendidikan, pelatihan, serta pengalaman. Tiga tingkat keterampilan yang harus dimiliki perangkat desa, yaitu: 1) pengetahuan dasar; 2) kualitas kepemimpinan; dan 3) keterampilan teknis. Perangkat desa harus memiliki keterampilan dasar: Pengetahuan terkait tata desa, pemahaman an pengetahuan terkait dasar-dasar dalam pemerintahan desa dan juga *knowledge* tentang tugas pokok dan fungsi (tuposki). Kemampuan manajemen seperti: manajemen sumber daya manusia (SDM), manajemen pelayanan publik, manajemen keuangan, dan manajemen aset. Kemampuan teknis meliputi:Penyiapan administrasi desa, penyiapan rencana pembangunan, penyiapan anggaran, penyiapan kerugianserta pelayanan publik.

c. Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa

Materi ini mengandung muatan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa adalah proses yang penting untuk pelaksanaan pembangun yang dilakukan oleh desa, dan tentunya pembangunan yang dilaksanakan bertanggungjawab dan berdaya saing. Dengan demikian,

menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kapasitas dari perangkat desa untuk mengelola keuangan desa pengelolaan keuangan desa merupakan proses penting dalam pelaksanaan pembangunan desa yang bertanggung jawab dan berdaya saing. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Selama ini perangkat desa di Kabupaten Bandung pada umumnya sudah mengenal pengelolaan keuangan desa, namun belum memahami kerangka hukum dan tanggung jawab hukum secara khusus. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas perangkat desa di Kabupaten Bandung Barat untuk mengelola perekonomian desa. Terkait perekonomian desa, kepala desa wajib membuat laporan pelaksanaan APB desa dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Laporan ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran; penegakan dan manajemen; Pelaporan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Badan desa harus melibatkan lembaga desa yang diwakili oleh lembaga desa dalam tahap perencanaan dan penganggaran, agar program kerja dan kegiatan yang disusun sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuan masyarakat desa. diselenggarakan oleh desa. Selain itu, kepala desa harus mampu melakukan pencatatan atau minimal melakukan pencatatan transaksi berupa pertanggung jawaban keuangan. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

5. Pihak yang terlibat

Beberapa pihak yang terlibat

dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat
- b. Kabid. Penataan Desa DPMD Kabupaten Bandung
- c. Pimpinan Universitas
- d. Pimpinan Fakultas
- e. Tim Dosen di lingkungan FISIP Unjani sebagai penyelenggara kegiatan PPM
- f. Seluruh Dosen di lingkungan FISIP Unjani sebagai peserta kegiatan
- g. Para Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung
- h. Para Aparatur Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Bandung
- i. BPD di lingkungan Kabupaten Bandung
- j. Perwakilan BEM FISIP sebagai peserta kegiatan
- k. Perwakilan mahasiswa FISIP sebagai peserta dalam kegiatan tersebut

6. Luaran Kegiatan

Luaran Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

- a. IG FISIP Unjani <https://www.instagram.com/p/Cf7wZfnJyFG/?hl=en>
- b. Website FISIP Unjani <https://fisip.unjani.ac.id/2022/07/13/pelatihan-tata-kelola-pemerintahan-desa/>
- c. Media Online <https://porosindonesia.co.id/lpmm-unjani-dan-fisip-unjani-adakan-pelatihan-bagi-kepala-desa-dan-perangkat-desa-se-kabupaten-bandung-dan-bandung-barat/daerah/>
- d. Jurnal terindeks

- sinta
- e. Beberapa dokumentasi kegiatan dapat terlihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Pelaksanaan PkM



Gambar 3. Pemberian Materi

Melalui berbagai bentuk atau metode yang diberikan dalam kegiatan PPM dengan judul “Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep *Smart Village Government* di Kabupaten Bandung”, hasilnya dapat membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perangkat pengelolaan desa para kepala desa. Kabupaten Bandung sebagai modal unggulan pengelolaan organisasi pemerintahan, termasuk organisasi pengelolaan desa, untuk melaksanakan proses pengelolaan desa di masa digitalisasi dan globalisasi. Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi pemerintahan saat ini sudah menjadi kebutuhan akan keahlian teknologi. Sumber daya peralatan tersebut harus

dapat bekerja dalam sistem digital dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi yang dominan dalam dunia penyelenggaraan negara telah mengubah sistem pelayanan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam pengelolaan SDM maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Peran teknologi informasi dalam manajemen sangat besar dan perlu seimbang dengan kesiapan mesin sebagai implementasi yang sistematis dalam organisasi manajemen perencanaan ini. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat melatih aparat pemerintah desa dan mengikuti pelatihannya untuk meningkatkan proses manajemen pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terdeskripsikannya dengan jelas bahwa pembahasan dalam kegiatan ini telah menjadi kebutuhan akan literasi teknologi sebagai bagian dari kesiapan menghadapi globalisasi dan digitalisasi. Untuk menjadi Teknologi informasi merupakan landasan fundamental yang harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan baik dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Perubahan system pelayanan saat ini yang seolah tergantung kepada sistem komputerisasi dituntut aparatur pemerintahan desa mampu mengimbangnya sehingga proses penyelenggaraan dalam pemerintahan tetap berjalan dengan maksimal demi terwujudnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

SIMPULAN

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan

Desa Melalui Konsep *Smart Village Government* di Kabupaten Bandung ini dapat membantu memberikan pemahaman, wawasan serta dapat membantu peningkatan kualitas SDM Kepala Desa serta Sumber Aparatur Pemerintah Desa lainnya dalam membenahi, mengelola dan mengimplementasikan proses penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.

Saran yang diberikan sebagai berikut :

- a. Para Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa memiliki jiwa partnership sehingga mampu mengelola dalam organisasi pemerintahan desa
- b. Para kepala Desa dan aparatur pemerintah desa mempersiapkan diri dengan kecanggihan teknologi informasi pemerintahan
- c. Para kepala Desa dan Aparatur pemerintah Desa memiliki jiwa kompetis dan bersaing dalam pengembangan Pemerintahan Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini diselenggarakan oleh tim dosen FISIP UNJANI. Kegiatan PPM ini adalah bagian dari hibah internal Unjani yang dibiayai oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Dengan demikian, tim dosen FISIP Unjani menyampaikan terima kasih kepada LPPM karena telah memberikan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto. (2006). *Mewujudkan Good Geovernance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dennis,Anderson.,dkk. (2015). *E-Government Strategy, ICT and Innovation for Citizen Engagement*. New York: Springer
- Gasco-Hernandez, Mila. (2014). *Open Government: Opportunities and Challanges for Public Governance*. New York: Springer.
- Hari, Sabarno. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendytio, Medelina., dkk. (2014). *Open Government: Collaboration, Transparencyand Participation in Practice*. California: O'Reilly Media.
- Ndraha, Taliziduhu. (2002). *Sekilas Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad.
- Retna, Chitra S. (2013). *Independent Reporting Mechanism 2011-2013: Indonesia Progress Report*. Washington DC: IRM Open Government Partnership.
- Rianto, Budi., Tri Lestari. (2012). *Polri dan Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN).
- Sekretariat OGI. (2013). *OGI Self-Assessment Report Tahun 2012*. Jakarta: UKP-PPP.
- _____.(2014). *OGI Self-Assessment Report Tahun 2013*. Jakarta: UKP-PPP.
- Schwarze, R. (2005). *E-development: From Excitement to Effictiveness*. Washington.

UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, ditetapkan pada 30 April
2008

UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, ditetapkan
pada 18 Juli 2009.